

Judul : DPR, DPD, dan MPR Tandatangani MoU Dengan Polri: Bamsoet: Penguatan Keamanan Tidak Akan Ganggu Hubungan Rakyat Dengan Wakilnya

Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 7

DPR, DPD, dan MPR Tandatangani MoU Dengan Polri **Bamsoet: Penguatan Keamanan Tidak Akan Ganggu Hubungan Rakyat Dengan Wakilnya**

DPR dan Polri menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang peningkatan pengamanan di Kompleks Parlemen. Peningkatan pengamanan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan objek vital negara, bukan menjauhkan anggota Dewan dengan rakyat yang diwakilinya.

KEMARIN, MoU peningkatan pengamanan di lingkungan Parlemen ditandatangani langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta, Ketua MPR Zulkifli Hasan, serta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan pengamanan lingkungan Parlemen di Ruang Pertemuan, Gedung Nusantara III, kemarin.

"Ini dalam rangka meningkatkan keamanan, bukan menghindari dari kritik dan imunitas. Nota kesepahaman ini telah lama kami bahas, sejak peristiwa bom-bom bunuh diri beberapa waktu lalu," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam acara tersebut.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, peningkatan keamanan di lingkungan Parlemen sangat penting. Selain meningkatkan dan menjaga marwah institusi legislatif, MoU tersebut dilakukan karena tingginya potensi gangguan keamanan di lingkungan parlemen.

"Ini adalah bentuk sinergitas Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Kompleks Parlemen. Melihat po-



Ketua DPR Bambang Soesatyo (berjas) bersama Ketua DPD Oesman Sapta (kanan), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan pengamanan lingkungan Parlemen di Ruang Pertemuan, Gedung Nusantara III, kemarin.

tensi dan pengalaman seputar ancaman keamanan di MPR, DPR, dan DPD, kami perlu melakukan upaya konkret dengan Polri untuk melakukan peningkatan (keamanan)," jelas mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Setelah kesepahaman tersebut dicapai, jelas dia, lingkungan parlemen akan memiliki satuan pengamanan khusus atau polisi parlemen. Namun, ia memastikan, penguatan sistem pengamanan tidak akan membuat parlemen menjadi kaku dan angker. Tidak akan menjauhkan rakyat dengan wakilnya.

"Saya jamin, penguatan keamanan ini tidak akan mengganggu hubungan rakyat dengan wakilnya. Ini hanya pemenuhan standar operasional



pengamanan agar siapapun yang datang terjamin keselamatannya. Saya ingin masyarakat yang datang merasa aman, begitupun anggota Dewan dan pegawai yang bekerja di lingkungan parlemen," tutur Bamsoet.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga membahas lemahnya pengamanan di lingkungan parlemen. Bahkan, dirinya pernah menangani secara langsung insiden ledakan bom di basement Gedung Nusantara I DPR. Setelah insiden tersebut, lanjut dia, kepolisian melakukan evaluasi keamanan di seluruh sudut parlemen.

"Tahun 2003, saat menjadi Kasatkomplek, saya mengurus kasus ledakan bom di basement DPR. Kami bersyukur, saat itu

tidak ada korban jiwa. Setelah saya pelajari, hal itu disebabkan oleh lemahnya sistem pengamanan," ungkap dia.

Ia pun menemukan banyak titik yang bisa memudahkan para teroris masuk dan melakukan hal buruk dalam Kompleks Parlemen. Menurutnya, pelaku bom bisa masuk dari banyak pintu yang tidak dijaga, serta bebas masuk ke semua lantai di gedung-gedung tersebut.

"Sesuai Peraturan Kapolri Tahun 2007, Kompleks Parlemen termasuk dalam pengamanan objek vital negara. Sebagai simbol negara, pusat kekuasaan legislatif, maka kita harus lakukan pengamanan lebih baik. Tapi, pengamanan ini jangan sampai menjauhkan jarak antara rakyat dengan wakilnya," tandasnya. ■ ONI/TIM